

# Potensi dan Hambatan Pembangunan Ekonomi di Wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste

Desni Mariani Oematan

<sup>1</sup> School of Business and Management, DIT Timor-Leste

\*e-mail: [desnioematan@gmail.com](mailto:desnioematan@gmail.com)

## Abstrak

*Pergeseran paradigma dalam membangun wilayah perbatasan yang sebelumnya hanya sebagai wilayah pertahanan dan keamanan, menjadi motor penggerak ekonomi saat ini sedang terjadi. Terbukti dengan dibangunnya secara serentak Pos Lintas Batas Negara di tiga kabupaten yang ada di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan hambatan yang dihadapi dalam usaha pembangunan perekonomian, yang selanjutnya dirumuskan menjadi strategi yang lebih spesifik untuk membangun perekonomian di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjabarkan data yang ada secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste memiliki potensi hasil tani dan ternak yang mumpuni untuk meningkatkan volume perdagangan lintas batas. Namun kondisi hidup yang belum layak dan tingkat Indeks Pembangunan Manusia yang belum balik menghambat pembangunan perekonomian.*

**Kata kunci:** Pembangunan Perekonomian, Wilayah Perbatasan, Potensi, Hambatan

## Abstract

*A paradigm shift in developing border areas, which were previously only areas of defense and security, to become a driving force for the economy is currently occurring. This is proven by the simultaneous construction of National Border Posts in three districts in the Indonesia-Timor Leste border area. This research aims to determine the potential and obstacles faced in economic development efforts, which are then formulated into a more specific strategy for developing the economy in the Indonesia-Timor Leste border region. This research uses a qualitative descriptive method to describe the existing data comprehensively. The research results show that the Indonesia-Timor Leste border region has the potential for agricultural and livestock products to increase the volume of cross-border trade. However, living conditions that are not yet adequate and the level of the Human Development Index that has not yet returned are hampering economic development.*

**Keywords:** Economic Development, Border Areas, Potential, Obstacles

## PENDAHULUAN

Wilayah perbatasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN) termasuk kedalam Kawasan Strategis Nasional, termasuk kabupaten-kabupaten yang berbatasan langsung dengan Republic Democratic Timor Leste (RDTL) (Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara). Meski termasuk kedalam Kawasan Strategis Nasional, kesejahteraan masyarakat yang tinggal di perbatasan RDTL belumlah baik, hal tersebut tentu berimplikasi dengan kondisi perekonomian di perbatasan RDTL. Terbukti dari Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belu, salah satu kabupaten perbatasan RDTL, yang hanya 67,5, angka tersebut jauh di bawah Indeks Pembangunan Manusia Nasional sebesar 74,39 (BPS, 2023). Perbatasan lain yaitu Kabupaten Malaka bahkan memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang lebih rendah sebesar 64,5, salah satu yang terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data tersebut seharusnya menjadi semacam pengingat bagi pemerintah untuk serius membangun ekonomi di daerah perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Sebagai daerah perbatasan negara, NTT tidak dapat terlepas dari kompleksitas permasalahan yang banyak muncul di setiap daerah perbatasan negara, yaitu: ekonomi, sosial politik, ketenagakerjaan, juga pertahanan dan keamanan. Khusus persoalan ekonomi, pemerintah perlu membuat kebijakan yang pro ekonomi kerakyatan, seperti berfokus pada peningkatan harga jual barang hasil produksi masyarakat lokal. Salah satu contoh kebijakan yang dapat mewujudkan hal tersebut adalah melalui jalur perdagangan lintas batas negara (Oki, 2021).

Masih terdapat jarak yang cukup jauh antara kondisi perekonomian di perbatasan Indonesia-Timor Leste dengan perkotaan yang telah terbangun dengan baik di wilayah Indonesia barat. Kurang masifnya pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste membuat perekonomiannya tidak banyak berkembang dan semakin memperlebar jarak dengan wilayah lain yang dibangun dengan layak. Buruknya perkembangan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste tentu memiliki konsekuensi yang panjang. Akibat dari buruknya kondisi perekonomian menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat perbatasan juga rendahnya tingkat pendidikan, sehingga kualitas SDM yang tercermin dari IPM di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste bernilai rendah.

Buruknya dukungan infrastruktur penopang, belum meratanya pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste menunjukkan belum seriusnya pemerintah dalam memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste. Potensi-potensi yang ada di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste tidak akan pernah berkembang untuk berkontribusi dalam perekonomian setempat jika masalah-masalah sistemik dan infrastruktur pendukung tidak disiapkan oleh pemerintah.

Pemerataan pembangunan nasional yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk ekonomi sejatinya merupakan amanat UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lebih lanjut, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 turut mengamanatkan program prioritas pengembangan daerah yang dikemas dalam bentuk Program Pembangunan Nasional (Propenas). Propenas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di daerah perbatasan, juga memastikan ketertiban dan keamanan daerah perbatasan negara.

Propenas perlu dijalankan dengan baik sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mewujudkan keadilan ekonomi yang berujung pada kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut perlu dilakukan karena saat ini pelaksanaan Propenas belum berjalan dengan baik, di daerah perbatasan masih banyak ditemukan kesenjangan sosial, kemiskinan, masalah ketenagakerjaan, sampai masalah perekonomian. Ironisnya permasalahan tersebut seakan sudah menjadi hal yang lumrah terjadi di daerah perbatasan, termasuk perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Perlu diketahui sebelumnya bahwa perbatasan Indonesia-Timor Leste didominasi oleh perbatasan darat, yang mana sebenarnya memiliki peluang untuk berdampak baik misalnya lewat perdagangan lintas batas negara. Namun yang banyak terjadi justru berbagai masalah ekonomi khas daerah perbatasan seperti logistik, ketenagakerjaan, hingga kemiskinan. Dihadapkan dengan situasi ekonomi yang sulit sering membuat masyarakat terpaksa melakukan hal-hal tidak diinginkan salah satunya seperti Penyelundupan BBM, bahan sembako dimana adanya perbedaan nilai mata uang dan harga antara kedua negara merupakan salah satu alasan untuk melakukan hal tersebut.

Untuk menunjang pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste tentu perlu penguatan dari sisi keamanan, hal tersebut untuk meminimalisir pelanggaran hukum yang sering muncul di wilayah perbatasan negara seperti penyelundupan. Karenanya peran pihak kepolisian dan TNI dalam mengamankan perbatasan Indonesia-Timor Leste menjadi esensial. Pihak-pihak yang berwenang tersebut dapat menjalankan patroli bersama dengan Satgas Pamtas dan UPF PNTL (Unidade Patrulhamento Forientra Polisi Nasional Timor Leste) dalam rangka menjalin hubungan baik antar kedua negara dan menjaga perbatasan Indonesia-Timor Leste. Isu keamanan perbatasan Indonesia-Timor Leste juga berusaha ditanggulangi dengan Perpres No. 179/2014 Penetapan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN), dimana terdapat sembilan KSN dalam urusan pertahanan dan keamanan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara, dimana Nusa Tenggara Timur termasuk di dalamnya. Isu-isu tersebut perlu diselesaikan dengan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste. Namun pembangunan ekonomi perbatasan Indonesia-Timor Leste tentu memiliki isu tersendiri juga dalam meningkatkan kinerja sektor pertanian, peternakan, perdagangan dan jasa serta aktivitas

lintas batas. Amtiran et al., (2022) menyatakan bahwa meningkatkan volume perdagangan lintas batas negara dapat memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan. Perdagangan lintas batas negara ini perlu didorong, terutama perdagangan barang hasil pertanian, peternakan, dan produk yang dihasilkan oleh masyarakat lokal.

Indonesia sudah meresmikan setidaknya tiga Pos Lintas Batas Negara Terpadu (PLBN), yaitu: PLBN Motaain di Kabupaten Belu, PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka, dan PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara. Selain ketiga PLBN yang sudah diresmikan, masih ada satu PLBN yang akan segera diresmikan yaitu PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Semenjak pembukaan PLBN tersebut, kegiatan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan RDTL semakin meningkat. Meski begitu, berdasarkan hasil penelitian dari Maisondra (2019) dan Purnamasari et al., (2016) menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan yang dikerjakan dengan pesat, belum berdampak secara signifikan terhadap peningkatan perekonomian di kawasan perbatasan. Setelah pembangunan PLBN, banyak masyarakat yang membuka kios dan rumah makan di sepanjang jalan menuju PLBN, selain itu penyelundupan barang secara ilegal pun mulai berkurang (Jacob, 2022). Meskipun belum peningkatan ekonomi belum sesuai dengan yang diharapkan, tetapi adanya PLBN sedikit demi sedikit meningkatkan perekonomian sekitar.

Wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian daerah perbatasan seperti Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Wu (2001) menyatakan bahwa mengembangkan sebuah perbatasan darat negara dapat dilakukan dengan konteks pertumbuhan dan pengembangan ekonomi juga wilayah yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Mengetahui berbagai potensi ekonomi daerah perbatasan dan perspektif ekonomi kerakyatan sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang efektif dalam usaha untuk meningkatkan performa ekonomi dan kesejahteraan rakyat di daerah perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui potensi dan masalah di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste. Lebih lanjut, berdasarkan temuan penelitian dapat dilakukan perumusan strategi sebagai bahan masukan untuk merumuskan kebijakan dalam usaha untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat di daerah perbatasan Indonesia-Timor Leste.

### **Rumusan Masalah**

Permasalahan yang mendasari penelitian ini dimulai dari ketika RDTL resmi berdiri sendiri sebagai negara yang berdaulat pada tahun 2002, semenjak itu pula Nusa Tenggara Timur (NTT) secara resmi menjadi provinsi perbatasan. Situasi tersebut membuat posisi NTT menjadi strategis terutama di bidang ekonomi, pertahanan, dan keamanan.

Memahami posisi tersebut, pemerintah Republik Indonesia (RI) membuat perjanjian lintas batas negara dengan RDTL yang tertuang dalam *Arrangement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste on Traditional Border Crossings and Regulated Market* (2003). Dengan adanya kesepakatan tersebut, pemerintah RI dan RDTL sepakat untuk memberlakukan semacam Pas Lintas Batas (PLB) negara. PLB tersebut diperuntukan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste, dan memiliki fungsi sebagai dokumen perjalanan seperti semacam paspor dan Visa.

Lebih lanjut, Pemerintah RI juga membangun PLBN di tiga lokasi di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste. Berdasarkan Peraturan BNPP No.1 Tahun 2021, PLBN memiliki tiga fungsi, yaitu: pengawasan dan pelayanan perlintasan orang dengan dokumen paspor dan/atau dokumen pas lintas batas; pengawasan dan pelayanan perlintasan barang untuk perdagangan luar negeri dan/atau perdagangan perbatasan; dan pengawasan dan pelayanan perlintasan sarana angkutan barang, angkutan umum, dan/atau angkutan pribadi. Selain itu PLBN juga dibagi menjadi zona inti dan zona penunjang, zona penunjang sendiri dikhususkan sebagai zona pembangunan sarana prasarana dan pengembangan ekonomi.

Berdasarkan beberapa kebijakan Pemerintah RI yang telah diuraikan sebelumnya, sebenarnya Pemerintah RI memiliki paradigma yang sudah baik, tidak hanya memperhatikan sisi keamanan dan pertahanan, tetapi juga memikirkan perkembangan ekonomi di wilayah

perbatasan Indonesia-Timor Leste. Hal tersebut dapat terefleksikan dari kebijakan PLB dan PLBN yang menghendaki peningkatan aktivitas dagang antar kedua negara dan mengurangi penyelundupan barang dan tenaga kerja secara ilegal.

Meski begitu, sejak dibukanya akses formal perbatasan antara RI dan RDTL, masih belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar perbatasan Indonesia-Timor Leste. Hal tersebut dapat terlihat dari kualitas SDM dan IPM yang rendah, baiknya performa ekonomi di suatu daerah tercermin dari IPM di daerah tersebut (Rahmawati et al., 2020). Pendapatan Asli Daerah tiga kabupaten yang memiliki PLBN juga masih di bawah rata-rata seluruh kota/kabupaten di NTT (BPS, 2023).

Dengan posisi sebagai pintu gerbang perdagangan internasional dan Kawasan Strategis Nasional (KSN), seharusnya Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, dan Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki perekonomian yang lebih baik dari sekarang dan mampu menjadi motor pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut timbul *problem statement* untuk meninjau pertumbuhan ekonomi kabupaten yang berbatasan langsung dengan RDTL. Berangkat dari *problem statement* tersebut, terbentuk pertanyaan penelitian yaitu "**Apa Potensi dan Hambatan Pembangunan Ekonomi di Wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste?**". Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, selanjutnya akan disusun strategi pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste.

### **Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi dan hambatan pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste sebagai modal dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste.

### **Sasaran**

Berikut merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

- Mengetahui potensi perekonomian di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste
- Mengetahui hambatan perekonomian di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste
- Identifikasi strategi dalam membangun perekonomian di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste

### **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana penulis menggambarkan dan menjelaskan secara komprehensif peluang dan hambatan dalam membangun perekonomian di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste. Lebih lanjut, penelitian ini juga menggunakan metode studi kepustakaan untuk mengumpulkan, membaca, dan mengolah data penelitian.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Potensi Perekonomian**

Sumber daya alam terutama hasil tani adalah salah satu komoditas yang banyak diperdagangkan melalui lintas batas Indonesia-Timor Leste. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2023), Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, dan Kabupaten Timor Tengah Utara ketiganya memiliki kesamaan, yaitu memiliki banyak pertanian tanaman pangan dan peternakan. Tanaman pangan yang banyak dihasilkan di perbatasan wilayah Indonesia-Timor Leste, yaitu: jagung lokal, ubi kayu, dan jagung hibrida. Sementara untuk peternakan didominasi oleh pedaging, seperti: babi, ayam kampung, dan sapi potong.

Suatu wilayah yang kaya akan hasil alamnya tentu akan memiliki peluang untuk membangun perekonomian wilayahnya dengan baik. Ketiga kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah RDTL memiliki hasil tani dan peternakan yang mumpuni. Tentu saja hal ini merupakan sebuah potensi yang jika dapat dikelola dengan baik, akan meningkatkan perekonomian di ketiga kabupaten tersebut. Kondisi geografis Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, dan Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan langsung dengan RDTL memberikan peluang emas bagi ketiga kabupaten perbatasan tersebut untuk meningkatkan nilai hasil tani dan

peternakannya. RDTL yang menggunakan US Dollar sebagai mata uangnya tentu akan meningkatkan nilai hasil tani dan peternakan warga lokal jika dijual di pasar RDTL.

Perlu bagi pemerintah RI untuk mendorong perdagangan di zona PLBN. sebenarnya di setiap PLBN sudah ada pasar rakyat, tetapi belum digerakkan secara optimal. Berkaca pada kebiasaan penduduk perbatasan Swiss dan Perancis, terutama penduduk di wilayah Swiss, mereka lebih senang berbelanja ke pasar yang ada di perbatasan Perancis ketimbang berbelanja di Swiss. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan nilai mata uang kedua negara tersebut. Swiss Franc bernilai lebih tinggi ketimbang Euro, sehingga ketika berbelanja di Perancis mereka dapat menghemat banyak uang. Selain itu, pajak yang diambil ketika bertransaksi dapat dikembalikan melalui aplikasi karena mereka bukanlah penduduk Perancis. Para penduduk perbatasan Swiss, mereka secara mandiri pergi melewati PLBN Perancis untuk berbelanja.

Dari fenomena tersebut, Pemerintah RI perlu mengambil catatan dan mempelajari untuk mendorong fenomena serupa terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste. Sebagai permulaan, saat ini memang sudah terdapat pasar rakyat di Zona PLBN Motaain di Kabupaten Belu. Pasar dibuka bebas untuk siapa saja termasuk pengunjung dari Timor Leste. Berdasarkan penuturan dari Kepala PLBN Motaain, Engelbertus Klau, ketika diwawancarai oleh Tribun Flores pada Juni 2023, Engel menyatakan Pasar Rakyat di PLBN Motaain dibuka setiap hari Selasa dan konsisten menarik 600-700 pengunjung dari RDTL. Selain itu, menurut Engel, tingkat kunjungan warga RDTL ke Indonesia juga semakin meningkat semenjak pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan (BVK) pada Februari 2023. Namun, Engel menyatakan bahwa masih banyak keluhan dari para penduduk perbatasan dan pengunjung dari RDTL masih kurangnya Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang ada di Zona PLBN Motaain, para pengunjung terpaksa menempuh jarak kurang lebih 20 KM ke Ibukota Kabupaten Belu yaitu Atambua hanya untuk mengambil dan menukar uang di ATM.

Potensi yang dijabarkan sebelumnya sebenarnya sudah sedikit tergali, tetapi perlu peran Pemerintah RI yang lebih dalam untuk memaksimalkan potensi yang ada. Kemauan para Warga Negara RDTL untuk berbelanja di Pasar Rakyat Motaain, bahkan banyak pelancong yang mengunjungi Atambua, Ibu Kota Kabupaten Belu, sudah menjadi pertanda dan modal awal yang baik untuk membangun perekonomian wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste. Jusnaeni (2017) menyatakan bahwa pemerintah memiliki peran sebagai pendorong sehingga pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Artinya, pemerintah perlu memfasilitasi dan meregulasi agar modal awal yang sudah baik ini, dapat semakin berkembang dan lebih masif sehingga membantu dalam pembangunan perekonomian wilayah perbatasan Indonesia- Timor Leste. Pemerintah dapat mendengarkan keluhan terkait masih kurangnya fasilitas penunjang yang ada di PLBN, terutama fasilitas ATM dan pertukaran uang. Kemudahan yang didapat ketika berkunjung ke Indonesia akan membuat pengunjung dari RDTL tidak segan untuk kembali mengunjungi dan berbelanja di Indonesia.

Sukirno (2016) menyatakan bahwa salah satu tujuan dari perdagangan internasional adalah memenuhi kebutuhan barang yang masih belum cukup produksinya di dalam negeri. Dengan adanya zona perdagangan di PLBN, maka perdagangan lintas batas negara sangat mungkin dilakukan untuk meningkatkan perekonomian di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste. Pemerintah RI dapat melakukan riset terkait produk yang dibutuhkan masyarakat RDTL tetapi masih sulit didapatkan di RDTL, dari sana pemerintah RI dapat membuat kebijakan insentif bagi masyarakat RI yang mau memproduksi barang tersebut. Dengan strategi tersebut, perdagangan lintas batas akan semakin meningkat dan berkontribusi maksimal terhadap pembangunan perekonomian di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari Kurnia (2018) yang menyatakan bahwa ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dan keberagaman produk, merupakan faktor utama dalam meningkatkan frekuensi perdagangan lintas batas.

Masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste memiliki kesamaan secara sosial dan budaya, hal tersebut disebabkan kedekatan kondisi geografis dan topografi yang bersebelahan. Karenanya, antara kedua penduduk negara banyak terjadi asimilasi budaya dan hubungan emosional. Sebagai contoh: kesamaan bahasa, kesamaan kebiasaan, dan

maraknya perkawinan di antara kedua belah pihak berdampak pada kedekatan secara sosial dan budaya. Faktor kedekatan secara sosial dan budaya ini menjadi peluang bagi Pemerintah RI untuk 'memancing' perdagangan lintas batas. Tentu ketika berbelanja dengan pedagang yang berbicara bahasa daerah yang sama, maka kekhawatiran kita akan ditipu semakin berkurang, sehingga akan lebih nyaman ketika berbelanja dengan pedagang yang memiliki latar sosial dan budaya yang sama. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2013) dan Aula et al., (2019), mereka menyatakan bahwa hubungan kekerabatan dan kesamaan latar sosial dan budaya yang dimiliki masyarakat wilayah perbatasan, dapat mempengaruhi perdagangan lintas batas. Sebenarnya perdagangan lintas batas yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste sudah berlangsung sejak lama. Para Warga Negara RDTL yang melakukan kunjungan adat ke wilayah RI, seringkali membawa buah tangan dan berbelanja terlebih dahulu sebelum kembali ke RDTL. Dengan ini, Pemerintah RI sebenarnya memiliki modal yang kuat dalam usaha membangun perekonomian di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Berdasarkan paparan beberapa paragraf di atas, tiga kabupaten yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste memiliki banyak peluang dan modal awal yang baik dalam usaha membangun perekonomian daerah perbatasan. Mulai dari akses perlintasan negara yang mudah karena sudah dibangun masing-masing satu PLBN di tiga kabupaten perbatasan, sehingga meningkatkan jumlah kunjungan Warga Negara RDTL ke Indonesia. Selanjutnya terdapat perbedaan nilai mata uang Rupiah dan US dollar yang digunakan RDTL tentu memercikkan keinginan warga RDTL untuk mencari alternatif belanja yang lebih murah, dengan perbedaan mata uang, maka berbelanja di Indonesia tentu dapat membuat mereka menghemat sejumlah uang. Pemerintah RI juga sudah memiliki *best practice* di wilayah perbatasan Swiss-Perancis, dimana perbedaan mata uang juga terjadi, meskipun nilai mata uang tidak berbeda jauh, tetapi tetap menjadi alasan utama warga Swiss di perbatasan lebih senang berbelanja di Perancis. Terakhir, penduduk wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste sudah terbiasa saling berkunjung dan berbelanja karena faktor kedekatan sosial budaya. Dengan ini Pemerintah RI memiliki modal awal yang baik untuk membuat kebijakan guna menstimulasi perdagangan lintas batas, sehingga dari hasil kegiatan perdagangan tersebut dapat membangun perekonomian di ketiga kabupaten yang terletak di perbatasan Indonesia-Timor Leste.

## Hambatan

- Hambatan Sumber Daya Manusia

Seperti yang sudah sempat disinggung pada bagian pendahuluan, ketiga kabupaten yang ada di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste memiliki permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang mumpuni, hal tersebut tercermin dari IPM yang masih di bawah rata-rata nasional dan bahkan di bawah rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masalah rendahnya kualitas SDM ini menjadi sebuah *concern* yang memiliki tingkat urgensi tinggi, tanpa SDM yang mumpuni tentu saja daerah perbatasan akan kesulitan memproduksi komoditas yang berkualitas baik. Selain itu, tentu saja akan kesulitan untuk memasarkan hasil produksinya. Spencer dan Spencer dalam Syarifudin (2014) menulis terkait kompetensi SDM, sebagai berikut: "*an underlying characteristics of an individual which is causally related to criterion-referenced effective and or superior performance in a job or situation*". Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis menerjemahkan bahwa, kompetensi atau kemampuan dari SDM yang ada secara kasual mempengaruhi performa dari pekerjaan. Dari sini sudah jelas bahwa jika menginginkan pembangunan perekonomian, maka perlu dilakukan pembenahan SDM.

Belum mumpuninya kompetensi SDM yang ada di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste tentulah merupakan masalah sistemik. kenapa masalah tersebut dikategorikan dalam masalah sistemik? karena kualitas SDM yang baik dimulai kualitas pendidikan yang baik. Seperti yang sudah diketahui khalayak banyak, pendidikan di wilayah perbatasan sering kali masih belum dapat dikatakan memiliki kualitas yang layak. Kesempatan anak-anak di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste untuk dapat mengakses pendidikan yang layak tentu saja menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah RI perlu membangun dan

membuka akses pendidikan bagi penduduk perbatasan Indonesia-Timor Leste, dimulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai tingkat Sekolah Menengah Kejuruan/Sederajat. Selain itu pemerintah juga perlu menyesuaikan jurusan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sesuai dengan kebutuhan industri yang dibangun untuk membangun perekonomian wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste. Hal tersebut dilakukan agar SDM yang dicetak dari SMK tersebut dapat langsung terjun membangun perekonomian di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste. Tentu dengan terserapnya SDM ke dalam pekerjaan yang tepat, dapat mempercepat pembangunan perekonomian.

Masalah tidak selesai dari membangun akses pendidikan yang layak dan merata di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste, karena faktanya banyak anak putus sekolah atau enggan untuk melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi setelah mereka lulus. Hal tersebut terjadi karena mereka melihat tidak ada gunanya pendidikan jika pada ujungnya tidak ada kesempatan pekerjaan yang lebih baik mereka. Semangat untuk menempuh pendidikan ini perlu dipupuk dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan dan industri yang relevan di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste. Ketersediaan lapangan pekerjaan dan industri yang relevan dapat menstimulasi dan memotivasi anak-anak di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste untuk sekolah setinggi-tingginya.

- **Hambatan Infrastruktur**

Seperti kondisi infrastruktur yang umum terjadi di wilayah perbatasan, di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste pun bernasib sama. Infrastruktur yang tersedia belum banyak menunjang bahkan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti air bersih. Kemegahan PLBN Motamasin dan PLBN Motaain ternyata tidak menjamin warga sekitarnya dapat hidup dengan layak, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar air bersih pun penduduk sekitar PLBN masih kesulitan. Dilansir dari laman resmi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada Oktober 2023, PLBN Motamasin turun tangan untuk membantu mengentaskan krisis air yang terjadi di Kabupaten Malaka. Hal tersebut menjadi ironi tersendiri, sebab Pemerintah RI mampu membangun bangunan megah, tetapi lalai terhadap kelangsungan hidup warga di sekitar bangunan tersebut.

Pembangunan PLBN tentu bukanlah hal yang buruk, justru merupakan hal yang baik dan dapat memaksimalkan peluang ekonomi dengan meningkatkan nilai jual dari hasil produksi lewat perdagangan lintas batas. Namun, pembangunan juga perlu diiringi dengan keberlangsungan hidup dan hajat lingkungan yang baik, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat memberi manfaat yang maksimal tanpa menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Paradigma pembangunan haruslah memikirkan kesejahteraan dan hajat hidup penduduk yang berada disekitar pembangunan, jangan sampai pemerintah membangun sesuatu dengan tujuan kesejahteraan umum, tetapi justru lalai akan pemenuhan kebutuhan hidup penduduk sekitar. Jika begitu, seakan-akan tujuan pembangunan menjadi omong kosong belaka.

- **Hambatan Perekonomian**

Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, dan Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan kabupaten perbatasan yang memiliki banyak petani dan peternak. Hasil tani yang mereka hasilkan juga memiliki kesamaan yaitu berfokus pada tanaman pangan dan hewan pedaging. Sebelumnya pada pembahasan potensi perekonomian, sektor pertanian dan peternakan ini menjadi potensi yang menjanjikan tetapi dengan catatan jika dikelola dengan baik. Mengapa dengan catatan jika dikelola dengan baik? karena pada saat ini, berdasarkan data BPS (2023), di ketiga kabupaten tersebut masih didominasi oleh petani gurem.

Petani gurem adalah klasifikasi pelaku tani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. Dengan persentase lebih dari 50% petani yang ada di ketiga kabupaten tersebut merupakan petani gurem. Di Kabupaten Belu saja, kabupaten yang pembangunannya paling baik di antara ketiga kabupaten di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste, tingkat petani gurem mencapai angka 57,89%. Angka tersebut hanya jumlah petani gurem, belum terhitung petani yang tidak memiliki lahan sama sekali. Selain permasalahan petani gurem, ternyata lebih dari dua dari tiga petani di ketiga kabupaten tersebut tidak menggunakan pupuk dalam

bertani.

Lebih lanjut, saat ini masih belum banyak industri pertanian yang tumbuh di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste, meskipun wilayah tersebut memiliki hasil tani dan ternak yang besar. Per Oktober 2023 hanya ada satu usaha pertanian berbadan hukum yang berdiri di ketiga kabupaten tersebut. Padahal industrialisasi merupakan kunci dalam pembangunan perekonomian suatu daerah. Dengan banyaknya industri yang tumbuh, maka lapangan pekerjaan juga semakin banyak dan hal tersebut artinya akan meningkatkan daya beli dari para penduduk sekitar industri tersebut. Dengan adanya industri pertanian, petani akan memiliki modal yang cukup dan pembeli yang pasti ketika musim panen telah tiba.

Pertumbuhan Industri juga akan meningkatkan IPM penduduk wilayah perbatasan Indonesia- Timor Leste. Seperti yang sebelumnya sudah dibahas pada bagian hambatan SDM, anak-anak penduduk perbatasan cenderung enggan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut disebabkan karena mereka merasa ‘percuma’ susah-susah belajar tetapi pada akhirnya tidak ada pekerjaan yang lebih baik yang akan menyerap mereka. Untuk itu, dengan tumbuhnya industri, maka perlu juga menyesuaikan *input* SDM yang akan diserap industri agar sesuai dengan kebutuhan industri. Karenanya pemerintah perlu membangun SMK pertanian dan menstimulasi industri pertanian agar tumbuh seiring sejalan.

Dari ketiga permasalahan tersebut dapat terlihat permasalahan perekonomian akut yang dijangkit para petani. Permasalahan ekonomi membuat para petani tidak dapat memiliki lahan yang lebih luas untuk digarap, jangankan perluasan lahan, untuk sekedar membeli pupuk pun para petani banyak yang tidak mampu. Maka, dalam rangka pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste, Pemerintah RI perlu memikirkan kesejahteraan para petani. Jika petani sejahtera, memiliki lahan yang cukup luas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan memiliki cukup pupuk untuk menghasilkan hasil tani yang berkualitas, dengan begitu daya beli para petani tentu akan naik. Kenaikan daya beli tentu saja berimbas pada sirkulasi ekonomi di daerah tempat petani tinggal, banyak produk akan dapat terjual, sehingga banyak orang yang daya belinya ikut naik.

### **Strategi Pembangunan Ekonomi**

Menyelesaikan masalah-masalah yang sudah terlanjur dibiarkan dalam waktu lama tentu bukan pekerjaan yang mudah, beberapa diantaranya mungkin saja sudah terlanjur mengakar dan sulit diubah. Namun bukan berarti pemerintah menyerah begitu saja menghadapi situasi tersebut. Pembangunan tiga PLBN di tiap kabupaten perbatasan Indonesia-Timor Leste dan dibentuknya BNPP merupakan langkah awal yang baik dari pemerintah pusat untuk menstimulasi pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan selanjutnya. Tentu masih banyak pekerjaan rumah dari program tersebut, tetapi perlu diingat bahwa pembangunan perekonomian perbatasan merupakan program jangka panjang dan berkelanjutan. Kesalahan yang terlanjur dibuat seperti tidak mendahulukan sarana penunjang kebutuhan hidup bagi penduduk setempat, tidak boleh sampai terulang.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang jelas dan terukur penting agar pihak swasta tidak enggan untuk datang dan membantu membangun perekonomian di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang ditulis Kurniadi (2009), beliau menulis bahwa: *“Potensi investasi yang terdapat di kawasan perbatasan cukup tinggi (banyaknya minat investasi), namun akibat tidak jelasnya kebijakan pengembangan perbatasan tersebut akan dibawa kemana, akhirnya investasi tersebut menunggu untuk diimplementasikan”*. Dari pernyataan tersebut penulis menerjemahkan bahwa, penting bagi pemerintah untuk memberi kesan *clarity* dan konsisten akan arah pembangunan ekonomi yang sudah disusun, dengan begitu pihak luar tidak akan segan untuk masuk membantu pembangunan perekonomian di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Penulis menilai bahwa masuknya pihak luar dapat menjadi kunci dalam strategi pembangunan perekonomian di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste, tentu setelah sarana penunjang kebutuhan hidup dan arah kebijakan pembangunan perekonomian yang jelas telah

tersusun. Pada bagian Hambatan Perekonomian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kemiskinan akut menyebabkan munculnya masalah-masalah lain, seperti: IPM yang rendah, kesempatan bekerja yang terbatas, dan banyaknya petani gurem. Jika akses pendidikan diperbaiki dan beriringan dengan masuknya industri, maka lulusan yang dihasilkan sudah siap untuk diserap industri pertanian yang berdiri. Dengan begitu, permasalahan keengganan anak untuk sekolah, sulitnya lapangan pekerjaan, dan rendahnya daya beli dapat dituntaskan. Tuntasnya permasalahan tersebut tentu memiliki konsekuensi terhadap pembangunan perekonomian di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste, karena sirkulasi ekonomi akan berputar dengan cepat. Adanya industri akan menghasilkan produk yang lebih banyak dan berkualitas, perdagangan lintas batas negara juga akan meningkat intensitasnya karena lokasi industri yang dekat dapat menurunkan biaya transportasi.

## KESIMPULAN

Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, dan Kabupaten Timor Tengah Utara sejatinya merupakan daerah yang berpotensi menaikkan nilai jual hasil produksinya lewat perdagangan lintas batas negara. Hasil tani yang melimpah berupa tanaman pangan, seperti: jagung; ubi; dan pisang, juga hasil ternak hewan pedaging, seperti: babi; sapi; dan ayam merupakan potensi yang menggiurkan jika hasil surplus pemenuhan kebutuhan pangan dalam daerah dapat dijual ke penduduk RDTL melalui perdagangan lintas batas negara. Penduduk lokal memiliki kesamaan latar belakang sosial budaya, sehingga sudah terbiasa berdagang antara satu sama lain. Pemerintah pun sudah membangun tiga PLBN dan pasar rakyat di setiap PLBN untuk memfasilitasi kegiatan perdagangan yang legal, sehingga dapat menstimulasi pembangunan perekonomian secara positif. Usaha pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste merupakan usaha jangka panjang yang memerlukan komitmen dari pemerintah pusat dan daerah setempat. Pembangunan yang ada masih belum cukup untuk menstimulasi sirkulasi ekonomi di wilayah perbatasan, sebab paradigma pembangunan yang masih mengabaikan prinsip *sustainable* atau berkelanjutan. Bagaimana penduduk memiliki daya beli yang baik jika kebutuhan hidup sepenting air bersih saja mereka masih kesulitan?. Selain itu, belum adanya *road map* yang jelas juga ikut menghambat pembangunan perekonomian. Ketidakjelasan tersebut dapat dilihat secara tersirat melalui fasilitas penunjang PLBN. Di setiap Zona PLBN terdapat pasar rakyat yang ditujukan untuk menggenjot angka perdagangan lintas batas. Namun, meski berfungsi sebagai sarana perdagangan, di dalam Zona PLBN tidak terdapat ATM dan tempat penukaran uang, padahal RDTL menggunakan uang yang berbeda dengan RI. Kurang terarahnya intervensi pemerintah terhadap pembangunan ekonomi memiliki konsekuensi terhadap kemauan pihak luar untuk membantu membangun industri pertanian, tanpa industrialisasi sebuah wilayah akan lebih sulit

membangun perekonomiannya karena kurangnya kepastian penghasilan bagi penduduk.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan, penulis menghasilkan serangkaian rekomendasi yang menyangkut pembangunan perekonomian di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste. Rekomendasi tersebut ditujukan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk mengintervensi pembangunan perekonomian di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste. Berikut merupakan rekomendasi hasil studi:

1. Perlu dibuat semacam *road map* pembangunan perekonomian yang jelas dan terukur
2. Intervensi kebijakan tidak boleh melenceng dari *road map* yang sudah dibuat
3. Pembangunan yang dilakukan haruslah berprinsip *sustainable*
4. Menstimulasi industri pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA

Amtiran, P. Y.; Anabuni, A. U. T.; Neno, M.S. (2022). Cross Border Trade: Strategy and Policy (Evidence from Cross-Border Trade in the Republic of Indonesia and the Republic Democratic of Timor Leste), J. Bus. Econ. Review, 7(3), 169-177. [https://doi.org/10.35609/jber.2022.7.3\(2\)](https://doi.org/10.35609/jber.2022.7.3(2)).

- Aula, H.; Hernoviyanti, R.; Mulki, G. (2019). Perdagangan Lintas Batas antar Negara Indonesia-Malaysia (Studi kasus di Kecamatan Badau-Distrik Lubok Antu). *Jurnal PWK, Laut, Sipil, Tambang*, 6(2).
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (2023). PLBN Motamasin Distribusikan Air Bersih ke Permukiman Warga Terdampak Kekeringan EL Nino. Badan Nasional Pengelola Perbatasan. <https://bnpp.go.id/berita/plbn-motamasin-distribusikan-air-bersih-ke-permukiman-warga-terdampak-kekeringan-el-nino>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu. (2023). Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap I Kabupaten Belu. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malaka. (2023). Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap I Kabupaten Malaka. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara. (2023). Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap I Kabupaten Timor Tengah Utara. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2023). *[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota 2021-2023*. Badan Pusat Statistik. <https://ntt.bps.go.id/indicator/26/46/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-ipm-menurut-kabupaten-kota.html>
- Jacob, A.R.P. (2022). Analisis Dampak Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terhadap 1250 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Program Studi Ilmu Politik*, 11(1).
- Jusnaeni, S. (2017). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sektor Pertanian. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Maisondra. (2019). Strategi dan Dampak Pembangunan Kawasan PLBN Entikong dalam Meningkatkan Perdagangan dan Keamanan Wilayah Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 4(2).
- Oki, K. K. (2022). *PERDAGANGAN LINTAS BATAS Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi-Timor Leste*. Penerbit Qiara Media.
- Peraturan** Badan Nasional Pengelola Perbatasan **Nomor 1 Tahun 2021**. Tentang Tipologi Pos Lintas Batas Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
- Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014. Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Purnamasari, W.; Kara, M.H.; AR, M.S.; dan K, A. (2016). Perkembangan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara Indonesia Malaysia di Sambas. *Jurnal Diskursus Islam*, 4(2), 217-247.
- Syarifudin, A. (2014). Pengaruh kompetensi SDM dan peran audit intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening sistem pengendalian internal pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen). *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 13(2).
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000. Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS).
- Sukirno, Sadono. (2016). Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta : PT. Rajawali Pers
- Wu, C. T. (2001). Cross-border development in a changing world: Redefining regional development policies. *Contributions in Economics and Economic History*, 2, 21-38.
- Wulandari, S.E. (2013). Hambatan Perdagangan Lintas Batas antara Masyarakat Indonesia dengan Masyarakat Timor Leste (Study kasus transaksi perdagangan lintas batas di pasar Motaain Nusa Tenggara Timur). *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 1(1): 1- 15